



Ada Rasionalisasi Anggaran 2018

Dewan Minta Eksekutif

Genjot Pendapatan

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah program nonfisik yang direncanakan tahun 2018 ini. Pasalnya, ada kesalahan asumsi terkait silpa tahun 2017 untuk menutupi defisit yang dipasang tahun 2018. Salah satunya disebabkan penurunan pendapatan karena situasi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang dikonfirmasi Senin (19/2) kemarin, mengatakan silpa yang diasumsikan untuk menutupi defisit anggaran 2018 adalah kenyataannya yang tersisa hanya sekitar Rp 150 miliar. "Sekitar Rp 450 miliar itu habis karena uang yang masuk (pendapatan, red) juga kurang. Terus pelaksanaan program hampir selesai semuanya, dengan asumsi 90 persen ternyata penyelesaian program 98 persen sehingga tidak tersisa duit. Ada

salah asumsi di sini," ujarnya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali.

Pastika menambahkan, situasi ekonomi sulit juga membuat pendapatan turun. Sebab, Pemprov Bali selama ini hanya mengandalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara pendapatan dari sewa aset tidak bisa diandalkan lantaran, menurutnya, tidak banyak yang mau menyewa aset pemprov. Belum lagi ada batasan menyewa aset selama lima tahun sesuai ketentuan yang

ada. Besaran silpa yang tidak sesuai asumsi dan adanya penurunan pendapatan inilah yang kemudian memunculkan rasionalisasi.

"Ada beberapa program di tahun ini yang tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat kita tunda dulu. Misalnya rapat-rapat, bikin kajian-kajian, perjalanan dinas, makan-minum, dikurangi semua. Nonfisik yang banyak, kalau pembangunan fisik tetap jalan terus," papar mantan Kapolda Bali ini.

Menurut Pastika, Badan

Pendapatan Daerah tahun ini mesti menggenjot pendapatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jika tidak, pemprov bisa tekor untuk menutupi kekurangan anggaran. Namun, Pastika menyebut pendapatan sejatinya tidak mungkin terus naik. Ada kalanya stagnan, bahkan turun, tergantung dari situasi ekonomi.

"Karena duitnya belum nyetok, kita kan masih nyari dari hari ke hari. Ada bayar pajak motor, masuk," imbuhnya. Namun, Pastika menjamin pembangunan Bali tetap berjalan dengan baik.

Diwawancara terpisah, anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, pendapatan Pemprov Bali paling banyak memang

bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pihaknya justru tidak melihat adanya penurunan pendapatan dari sana. Namun, Badan Pendapatan Daerah yang dikatakan belum maksimal untuk mengejar para penunggak pajak. "Sangat banyak, yang kita lihat kemarin banyak sekali. Misalnya, di Badung saja kita temukan 100 ribu motor tidak membayar pajak 2017. Tapi angkanya naik," ujar politisi PDI-P ini.

Adhi Ardhana menambahkan, ada pula potensi 5.000-6.000 kendaraan hobi yang bisa dioptimalkan sebagai pendapatan pajak. Oleh karena itu, pihaknya meyakini defisit yang tidak tertutupi oleh silpa masih bisa ditutupi oleh pendapatan di 2018. (kmb32)

Edisi : Selasa, 20 Februari 2018

Hal : 7